

## **PENDAMPINGAN PENGGUNAAN WEBSITE SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA KECAMATAN GENTENG**

**Zahrotul Arofah, Muhammad Roisul Basyar**

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email : [zahrotularofah2@gmail.com](mailto:zahrotularofah2@gmail.com) , [roisulbasyar@untag-sby.ac.id](mailto:roisulbasyar@untag-sby.ac.id)

### **ABSTRAK**

Penyelenggara pelayanan publik yang efektif dan efisien merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas hidup Masyarakat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam monitoring kinerja terhadap penyelenggara pelayanan public di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya menjadi salah satu mitra pada program Kemendikbud yaitu Magang Bersertifikat atau dikenal dengan MSIB. Dalam artikel ini, penulis berkontribusi secara langsung dalam kegiatan SAKIP yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi yang ditempatkan di Kecamatan Genteng. Dalam penelitian ini menggunakan metode kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak yang bertujuan memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan prosedur yang telah ditetapkan, hasil monitoring menjadi masukan penting untuk proses selanjutnya oleh mahasiswa MSIB 6 di Bagian Organisasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Surabaya.

**Kata kunci : SAKIP, Monitoring Kinerja, Pelayanan Publik**

### **ABSTRACT**

*Effective and efficient public service providers are one of the important factors in improving the quality of life of the community. However, in practice there are still challenges in monitoring the performance of public service providers within the Surabaya City Government. The Surabaya City Regional Secretariat Organization Section is one of the partners in the Ministry of Education and Culture program, namely Certified Internship or known as MSIB. In this article, The author contributes directly to SAKIP activities carried out by the Organization Section placed in Genteng District. In this study using a collaborative method involving various parties aimed at ensuring conformity between implementation and established procedures, the monitoring results become important input for the next process by MSIB 6 students in the Organization Section. This research is expected to contribute to improving the quality of public service implementation in Regional Apparatus Organizations in Surabaya.*

*Keywords : SAKIP, Performance Monitoring, Public Service*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yang terjadi di dunia sudah sangat maju dan berkembang. Dalam era globalisasi digital, negara-negara di dunia semakin terintegrasi ke dalam system teknologi yang memberikan dampak terhadap segala bidang. Saat ini teknologi informasi telah mendominasi diberbagai aktivitas kehidupan manusia. Bahkan keberadaanya telah mampu menciptakan revolusi tersendiri diberbagai sektor, baik sektor industri, sektor Pendidikan, sektor pemerintahan, dan berbagai sektor lainnya. Teknologi informasi yang sangat pasif digunakan di era globalisasi informasi saat ini adalah *internet* dan *website*. Peran serta pemanfaatan ilmu teknologi dalam kegiatan sehari-hari sangat berperan penting dan diperlukan terutama dalam dunia instansi ataupun organisasi perusahaan. Sesuai dengan adanya tujuan dibangunnya Website Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-Sakip) dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi, serta pengelolaan sumber daya pelaksanaan kebijakan, dan program yang dipercayakan kepada instansi pemerintah, berdasarkan suatu system akuntabilitas yang memadai untuk melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi instansi (Santoso & Saputra, 2021).

Aplikasi E-Sakip dibangun dengan berbasis website sehingga dapat diakses kapanpun dan dari manapun oleh setiap pengguna di Perangkat Daerah dengan menggunakan jaringan internet. Setiap Perangkat Daerah memiliki username dan password masing-masing untuk login dan juga dapat menambahkan/mengubah data Perencanaan, target kinerja, realisasi dan capaian kinerja serta evaluasi kinerja sesuai dengan OPD yang dikelolanya. Pada aplikasi E-Sakip ditampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Data hasil input di dalam E-Sakip dapat diunduh, yang format hasil unduhan dibuat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Data yang telah diinput oleh masing-masing Perangkat Daerah menjadi database Pemerintah Daerah masing-masing serta dapat dilihat atau diubah pada tahun-tahun berikutnya.

E-sakip (Putri et al., 2021) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Aplikasi ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Diharapkan dengan diterapkannya E-Sakip dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi perencanaan pembangunan, penggunaan anggaran, penyederhanaan birokrasi, serta inovasi dalam bidang pelayanan publik, inovasi dalam penegakan integritas, serta inovasi dalam tata kelola SDM dan penguatan kelembagaan di lingkup Pemerintah Kota Surabaya.

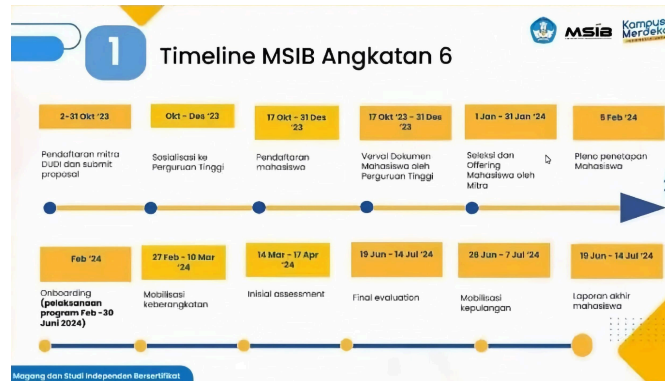
Dengan adanya E-SAKIP dapat memberikan manfaat untuk memperbaiki regulasi dan kebijakan serta mendorong pemerintah daerah dalam melakukan inovasi dalam mendisain program dan kegiatan. Selanjutnya, E-SAKIP dapat digunakan sebagai dasar dalam memberikan reward dan punishment terhadap kinerja instansi maupun individu di dalamnya. Manfaat tersebut baru bisa terlaksana jika ada komitmen yang kuat dari pimpinan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya mekanisme pertanggungjawaban kinerja yang melibatkan seluruh unsur pejabat teknis dan pimpinan (Rerung et al., 2020).

Dalam rangka upaya menyelenggarakan Pemerintahan yang bersih dan bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), sekaligus pemenuhan atas tuntutan public atas akuntabilitas kinerja pemerintah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dengan diberlakukan sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. System ini bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kota Surabaya, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Perangkat Daerah pada khususnya, dan kinerja Pemerintah Kota Surabaya pada umumnya.

## **METODE PELAKSANAAN**

Pelaksanaan program magang melalui proses seleksi calon peserta magang terlebih dahulu oleh mitra yaitu Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya melalui portal Kampus Merdeka. Kegiatan magang di Kecamatan Genteng dibimbing oleh pembimbing lapangan dan mentor dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Peran pembimbing lapangan yaitu sebagai fasilitator yang memberikan petunjuk serta informasi kepada mahasiswa magang terkait pekerjaan yang akan dilakukan selama kegiatan magang berlangsung. Sedangkan peran mentor yaitu memastikan bahwa mahasiswa magang telah

melakukan kegiatan magang sesuai dengan prosedur dan peraturan instansi yang telah ditentukan.



*Gambar 1 Timeline Linimasa MSIB Batch 6*

Dalam pelaksanaan kegiatan magang yang dilaksanakan oleh mahasiswa ini dibagi menjadi beberapa tahapan meliputi : tahapan persiapan dan tahapan pelaksanaan. Tahapan dari pelaksanaan kegiatan magang tersebut dijelaskan sebagai berikut :

**1. Tahap Persiapan**

Sebelum dapat melaksanakan kegiatan Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) di mitra dan instansi terkait yakni Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya, penulis melaksanakan tahapan pendaftaran pada akun Kampus Merdeka. Pendaftaran peserta dilaksanakan pada periode tanggal 16 Februari 2024 s/d 30 Juni 2024, dimana dalam melakukan pendaftaran tersebut terdapat beberapa dokumen yang harus disiapkan diantaranya adalah Surat Rekomendasi dari fakultas, Transkrip Nilai, CV, dan proposal magang yang harus dilengkapi. Setelah dinyatakan lolos seleksi administrasi, peserta kemudian melakukan tes seleksi tahap satu yang dilakukan pada tanggal 29 Desember 2023. Setelah itu, peserta akan mendapatkan email pernyataan lolos dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya untuk menerima tawaran magang tersebut. Setelah dinyatakan lolos dan menerima tawaran dari mitra, penulis kemudian melakukan koordinasi dengan kepala program studi terkait dengan konversi mata kuliah dalam pelaksanaan kegiatan magang ini.

**2. Tahap Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan magang pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya ini dimulai pada tanggal 16 Februari 2024 s/d 30 Juni 2024. Namun, periode magangnya terhitung sejak pelaksanaan pembekalan mahasiswa pada 16 Februari 2024. Pada pelaksanaan magang yang dilaksanakan di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya, penempatan di Kecamatan Genteng ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menekankan pada analisa dan deskriptif. Dalam kegiatan magang pada program Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB) bagi mahasiswa terdapat jadwal yang telah ditentukan selama kegiatan magang berlangsung. Pelaksanaan kegiatan MSIB yaitu pada Kecamatan Genteng terletak di Jl. BKR Pelajar No. 43, Kec. Genteng, Kota Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan selama 4 bulan kerja yang terhitung mulai pada tanggal 16 Februari s/d 30 Juni 2024 atau selama 135 hari kerja. Jadwal jam kerja selama pelaksanaan program MSIB di Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota

Surabaya adalah mengikuti aturan jam kerja dari instansi atau mitra terkait. Detail jam kerja yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

## **HASIL dan PEMBAHASAN**

E-Sakip merupakan website yang dirancang sebagai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Surabaya berbasis elektronik. Sistem ini dikelola oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya. Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan terhadap website ditemukan informasi bahwa E-Sakip merupakan rangkaian sistematis dari berbagai efektivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.



*Gambar 2 Halaman Utama Website E-Sakip*



*Gambar 3 Tampilan Isi Website E-Sakip*



*Gambar 4 Mentoring SAKIP*

Untuk melihat monitoring kinerja terhadap pelayanan publik pada perangkat daerah dalam bentuk tabulasi dengan indikator-indikator, di antaranya Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja serta Evaluasi Kinerja. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Adapun bagian dari perencanaan adalah sebagai berikut :

- 1) RPJMD/RENSTRA

RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

Sedangkan RENSTRA memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/ atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

- 2) Pohon Kinerja/Cascading

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan *outcome* yang diinginkan. melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Sedangkan Cascading merupakan strategi Pencapaian Hasil Kerja. Cascading diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa dalam menyusun strategi pencapaian hasil kerja karena tidak semua jenis, kondisi, struktur, dan bidang pekerjaan di unit kerja sama, maka dalam peraturan ini menyediakan dua cara yaitu dengan menggunakan metode cascading langsung (*direct cascading*) atau cascading tidak langsung (*non-direct cascading*).

- 3) IKU

Merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional.

- 4) RKPD/Renja

- Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional Pemerintah.
- 5) RKT  
Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi/kerja melalui berbagai kegiatan tahunan.
  - 6) Renaksi  
Rencana Aksi (Renaksi) adalah dokumen yang memuat sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas yang digunakan sebagai acuan lembaga, dan pemerintah daerah dalam melaksanakan suatu tema kebijakan tertentu.
  - 7) Probis  
Proses bisnis ini menunjukkan hubungan antar unit kerja, input, output serta pihak-pihak eksternal lain yang terlibat sebagai acuan.
  - 8) Perkin  
Perjanjian Kinerja (Perkin) merupakan kesepakatan kinerja yang terukur anantara pemberi amanah dengan penerima amanah.
  - 9) DPA  
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen yang dibuat oleh setiap instansi pemerintahan sebagai pedoman dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
2. Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran, sesuai target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Adapun bagian dari Pengukuran Kinerja adalah sebagai berikut :
- 1) Monev TSPK  
Sistem informasi monitoring dan evaluasi merupakan sistem berbasis web digunakan untuk monitoring dan evaluasi realisasi dan capaian indikator (Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan) perencanaan kota surabaya, mempunyai fungsi sebagai berikut :
    - a. Monitoring realisasi dan capaian indikator perencanaan kota
    - b. Evaluasi terkait perencanaan kota
    - c. Perhitungan nilai realisasi indikator (Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan)
  - 2) Monev EPerformance  
E-Performance atau biasa juga disebut aplikasi e-kinerja adalah sebuah sistem informasi manajemen yang digunakan oleh pemerintah daerah atau instansi untuk mengelola/menilai prestasi kerja pegawai.
3. Pelaporan Kinerja merupakan dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja setiap Unit Kerja. Adapun bagian dari Pelaporan Kinerja adalah sebagai berikut :
- 1) E-LKJ

Laporan Kinerja merupakan dokumen yang berisi secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja. Laporan Kinerja terbagi menjadi 2 yaitu Laporan Kinerja APBD dan Laporan Kinerja Pohon Kinerja.

4. Evaluasi Kinerja merupakan untuk perbaikan kinerja kualitas public dan penguatan akuntabilitas kinerja. Adapun bagian dari Evaluasi Kinerja adalah sebagai berikut :
  - 1) Evaluasi Sakip dan/ atau Tindak Lanjut Evaluasi  
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dari kegiatan magang yang berupa kontribusi mahasiswa dalam kegiatan Monitoring Kinerja Instansi Pemerintah memberikan hasil yang baik dan efektif terhadap pelayanan publik. Hal ini sangat membantu Pemerintah Kota Surabaya, terutama Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surabaya dalam melakukan perbaikan dalam Upaya meningkatkan kinerja penyelenggara pelayanan publik. Dengan demikian, peningkatan kerja instansi pemerintah memerlukan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan partisipasi aktif dalam proses monitoring kinerja. Dalam pelaksanaan magang penulis turut berperan dalam membantu pelaksanaan kelengkapan dokumen SAKIP, LKj, Perkin di wilayah Kecamatan Genteng. Hal ini menegaskan pentingnya peran monitoring kinerja dalam mendukung pencapaian tujuan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Putri, R. H., Surabaya, U. N., Rahaju, T., & Surabaya, U. N. (2021). *Implementasi SAKIP dalam Perencanaan ... IMPLEMENTASI SAKIP DALAM PERENCANAAN STRATEGIS DI DPMPTSP NAKER. 2005*, 2173–2186.
- Rerung, R. R., Fauzan, M., & Safrudin, M. S. (2020). Kinerja Website Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. *Jurnal Telematika*, 15(1), 29–38.
- Santoso, B., & Saputra, W. (2021). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Berbasis Web Mobile. *Jurnal Teknik Informatika Musirawas)* Budi Santoso, Satrianansyah, 6(1), 72–80.